

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Kurniasih dan Sari, 2013). Pihak prinsipal dianggap hanya mementingkan hasil keuangannya saja, sedangkan pihak agen dianggap mementingkan bonus atau kompensasi dari pihak prinsipal. Terjadinya asimetri informasi inilah yang difokuskan pada teori agensi pada masalah-masalah yang timbul karena informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua informasi diketahui oleh kedua belah pihak secara lengkap.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari terjadinya asimetri informasi menurut (Samuelson, 2011) dalam (Ardiyansyah, 2014) adalah sebagai berikut :

1. *Adverse Selection*

Adverse selection mengungkapkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen.

2. *Moral Hazard*

Moral Hazard menjelaskan tentang suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pihak agen (manajemen perusahaan) yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut terjadi akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh para pemegang saham maupun kreditur sehingga memungkinkan agen untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma.

Untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi antara pihak agen dan pihak prinsipal, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan menurut (Hidayanti, 2013) adalah sebagai berikut :

1. *Market Forces*

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara mayoritas diyakini dapat mengatasi masalah asimetri informasi. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan sehingga menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

2. *Agency Cost*

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain berasal dari biaya intensif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Salah satu penggunaan *agency cost* adalah dengan penggunaan jasa komite audit yang bertugas mengawasi dan memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh agen sebagai penilaian dalam kinerja agen itu sendiri pada perusahaan.

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan Indonesia yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin dan beban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan menjadi lebih kecil. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan

manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Ardiansyah, 2014).

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agen terkait dengan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh agen. Sebuah perusahaan tergolong besar apabila memiliki total aset yang besar pula. Total aset akan bertambah seiring dengan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, total aset juga terus bertambah seiring dengan bertambahnya liabilitas dan ekuitas perusahaan karena mengharuskan adanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Namun bisa saja agen melakukan manipulasi sehingga harus dibuktikan dengan besarnya ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan guna mengindikasikan terjadinya agresivitas pajak perusahaan (Nugraha, 2015).

2.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan hal yang umum dikalangan perusahaan-perusahaan besar diseluruh bagian dunia. Karena tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang sekarang menjadi perhatian publik karena merugikan Negara (Fardilah, 2015). Agresivitas pajak adalah bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak, agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak dengan tindakan legal dengan tujuan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dengan agresivitas pajak untuk mengurangi pajak terutang dilakukan dengan lebih agresif (Jessica dan Toly, 2014). Definisi agresivitas pajak dalam penelitian ini mengacu pada pengertian yang digunakan oleh (Hadi dan Mangoting, 2014) yaitu suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan memanfaatkan celah hukum yang menimbulkan perbedaan persepsi beberapa pihak dan dijadikan peluang oleh wajib pajak untuk melakukan

penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan hukum sebagai argumen pembenaran atas pelanggaran pajak.

Dari beberapa pengertian agresivitas pajak diatas, reformasi perpajakan tentunya diciptakan agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif. Selain alasan pajak dianggap sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi laba perusahaan, terdapat alasan lain yang mendorong perusahaan melakukan penghematan pajak menurut (Yushita, 2015) antara lain :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar maka semakin besar kecerendungan wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus maka semakin besar celah wajib pajak melakukan penghematan pajak
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecilnya kemungkinan pelanggaran untuk terdeteksi memotivasi wajib pajak melakukan penghematan pajak
4. Besaran sanksi. Semakin ringan sanksi yang diperoleh oleh pelanggar pajak memotivasi wajib pajak melakukan penghematan pajak.

Selain itu, pihak perusahaan yang akan melakukan tindakan agresivitas pajak juga pasti mempertimbangkan adanya kemungkinan keuntungan dan kerugian yang akan timbul, menurut (Suyanto, 2012) terdapat dua keuntungan yang diperoleh perusahaan atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan :

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara. sehingga jumlah kas yang dimiliki perusahaan semakin besar dan dapat digunakan sebagai pendanaan investasi perusahaan yang mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang.
2. Keuntungan bagi manajer berupa kompensasi atau bonus atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Sedangkan kerugian yang mungkin timbul atas tindakan agresivitas pajak perusahaan adalah :

1. Kerugian berupa sanksi atau denda dari kantor pajak.
2. Turunnya harga saham perusahaan karena investor mengetahui tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Sedangkan kerugian bagi pemerintah berupa berkurangnya pendapatan negara dalam sektor pajak.

Agresivitas pajak memiliki lima komponen pengukuran, yaitu *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), *book-tax difference* Manzon-Plesko (BTD_MP), *book-tax difference* Desai-Dharmapala (BTD_DD) dan *tax planning* (TAXPLAN) (Hidayanti, 2013). Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan adalah ETR, ETR merupakan proksi yang paling sering digunakan dalam penelitian terdahulu guna mengetahui tingkat agresivitas pajak perusahaan. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak akan tetap menjaga laba akuntansi keuangan dengan nilai ETR yang rendah. Dengan demikian ETR dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas perusahaan (Lanis dan Ricardson, 2013 dalam Sagala, 2015).

2.3 Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Harahap, 2010:301). Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancar lainnya. Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan mulai lambat membayar kewajiban, pinjaman bank dan kewajiban yang lain. Jika kewajiban lancar naik lebih cepat dari aset lancar, maka nilai likuiditas akan turun dan ini merupakan pertanda adanya masalah (Brigham dan Houston, 2010:134). Tidak dapat dipungkiri bahwa salah

satu patokan kuat tidaknya keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu perusahaan dalam membayarkan kewajibannya. Suatu analisis likuiditas yang penuh diperlukan penggunaan anggaran kas, tetapi dengan menghubungkan kas dan aset lancar lainnya dengan kewajiban lancar, analisis ini memberikan pengukuran yang cepat dan mudah digunakan. Dalam praktiknya terdapat banyak tujuan dan manfaat yang diperoleh dari rasio likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pemilik, manajemen perusahaan dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditur dan supplier. Adapun tujuan dan manfaat menurut (Kasmir, 2014:132) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan atau utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.
10. Bagi pihak luar perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya akan menjadi jaminan bagi para pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya dan juga dapat memberikan keputusan penjualan barang dagangnya secara angsuran bagi pihak supplier.

Menurut (Brigham dan Houston, 2010:134) terdapat dua jenis likuiditas :

1. Rasio Lancar

Rasio lancar adalah rasio yang paling utama dalam likuiditas yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menggambarkan sejauh mana kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversikan menjadi kas dalam waktu dekat. Aset lancar meliputi kas, efek yang dapat diperdagangkan, piutang usaha dan persediaan.

2. Rasio Cepat

Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Persediaan pada umumnya merupakan aset perusahaan yang paling tidak likuid sehingga persediaan merupakan aset, dimana kemungkinan besar terjadi kerugian bila terjadi likuidasi. Oleh karena itu, rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan sangat penting artinya.

Likuiditas memiliki tiga komponen dasar yaitu kerapatan, kedalaman dan resiliensi. Ketiga komponen likuiditas ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk menjaga tingkat likuiditas dan kestabilan kondisi ekonomi sebuah

perusahaan (pengertiandefinisi.com). Adapun penjelasan dari ketiga komponen likuiditas adalah sebagai berikut :

1. Kerapatan merupakan gap yang terjadi dalam harga yang disetujui dengan harga normal suatu barang
2. Kedalaman merupakan jumlah ataupun volume produk yang dijual dan dibeli pada tingkat harga tertentu.
3. Resiliansi merupakan kecepatan perubahan harga menuju harga efisien setelah berlangsungnya penyimpangan maupun ketidak stabilan harga.

2.4 Manajemen Laba

Belum adanya kesepakatan mengenai definisi manajemen laba menimbulkan perhatian yang berkelanjutan oleh berbagai pihak. Secara umum, manajemen laba adalah upaya yang dilakukan manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2014:6). Definisi manajemen laba menurut (Suyanto, 2012) sebagai tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost*. Manajemen laba juga memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan juga perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Sedangkan menurut (Tiaras dan Wijaya, 2015) berpendapat bahwa manajemen laba merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh laba atau pendapatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Penggunaan penilaian dan estimasi dalam akuntansi mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi dalam dan pengalaman mereka untuk menambah kegunaan angka akuntansi. Namun, beberapa manajer menggunakan kebebasan ini untuk mengubah angka akuntansi termasuk laba untuk kepentingan pribadi sehingga mengurangi kualitas laporan keuangan dengan mekanisme manajemen laba menurut (Subramanyam dan Wild, 2013:131) adalah Sebagai berikut :

1. Pemindahan Laba

Pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba satu periode ke periode yang lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Contoh pemindahan laba adalah memindahkan beban pada periode berikutnya dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu, misalnya memilih metode FIFO untuk menilai persediaan dan tidak memilih metode LIFO.

2. Manajemen laba melalui klasifikasi

Laba ditentukan dengan cara khusus mengklasifikasikan beban dan pendapatan pada bagian tertentu di laporan laba rugi. Bentuk lainnya adalah memindahkan beban dibawah garis atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang sehingga tidak dianggap penting oleh analisis. Contoh manajemen laba melalui klasifikasi adalah saat perusahaan menghentikan suatu segmen usaha, laba tersebut harus dilaporkan secara terpisah sebagai laba atau rugi operasi yang dihentikan. Oleh beberapa perusahaan biasanya pos ini diabaikan karena dianggap tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. namun ada juga beberapa perusahaan mengalokasikan porsi biaya tersebut secara cukup besar pada segmen yang dihentikan, sehingga menghasilkan laba untuk bagian perusahaan yang lainnya.

Terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam melakukan manajemen laba menurut (Sulistyanto, 2014:63), yaitu :

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang diberikan oleh pemilik kepada manajer tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan

manajerial. Agar dapat mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer memperlakukan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus tersebut dapat dicapai. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik memperoleh kerugian ganda, yaitu menerima informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

2. *Debt (Equity) Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih metode akuntansi yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada keuntungan tertentu yang diperoleh. Keuntungan tersebut dapat berupa permainan laba agar kewajiban utang piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya, sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan berdampak pada pengambilan keputusan dalam mengalokasikan sumberdaya.

3. *Political Cost Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkan. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar peraturan pemerintah seperti undang-undang perpajakan apabila ada manfaat atau keuntungan tertentu yang diperoleh. Manajer akan memperlakukan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan harapan perusahaan.

Sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan dari pemilik perusahaan kepada pihak yang mampu menjalankan perusahaan dengan baik. Sebagai penerima wewenang, manajer sebaiknya mampu untuk memegang tanggungjawab untuk mengelola perusahaan dan bekerja untuk pemilik. Namun yang terjadi sebaliknya, manajer bekerja hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Bahkan dalam perkembangannya manajer

tidak hanya mengambil hak pemilik tetapi hak semua pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan.

Banyaknya perbedaan pendapat mengenai manajemen laba menyebabkan timbulnya perbedaan sudut pandang atas aktivitas rekayasa manajerial ini. Satu pihak menyatakan bahwa manajemen laba sebagai permasalahan yang harus segera diselesaikan karena secara signifikan mempengaruhi laba perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh stakeholder. Apalagi jika rekayasa manajerial ini sampai menyesatkan dan merugikan banyak pihak. Sementara pihak lain menilai bahwa manajemen laba bukanlah suatu masalah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Alasannya adalah aktivitas ini merupakan dampak dari luasnya prinsip akuntansi berterima umum. Oleh sebab itu, pandangan diperlunya tindakan dalam mengeliminasi manajemen laba adalah dengan melakukan koreksi terhadap standar akuntansi yang diterima dan dipakai secara umum (Sulistyanto, 2014:105).

Proksi yang digunakan penulis untuk manajemen laba adalah model spesifik akrual. Model spesifik akrual digunakan untuk mendeteksi praktek terjadinya manajemen laba dan digunakan proksi rasio modal kerja dengan penjualan. Karena penjualan digunakan sebagai deflator akrual modal kerja dan manajemen laba banyak terjadi diakun penjualan sebagaimana dijelaskan oleh (Nelson et al, 2000) dalam (Achyani, Triyono dan Wahyono, 2015).

2.5 Corporate Governance Yang Diproksikan Dengan Komite Audit

Corporate governance merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi dalam tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008:36). Sementara menurut (Yunita, 2011) mengatakan bahwa *corporate govenance* merupakan azas yang menjadi landasan hubungan dalam semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, baik pengelola, pemegang saham maupun pihak stakeholder lainnya agar dapat melakukan pengelolaan perusahaan yang baik sehingga semua pihak tidak saling

merugikan. *Corporate governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu perusahaan yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Wijayanti, Wijayanti, Samrotun, 2016). Semakin meluasnya penerapan *corporate governance* disuatu perusahaan memicu motivasi perusahaan untuk menjalankan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Krisis ekonomi yang muncul dan membuat banyak perusahaan menjadi bangkrut karena tidak diterapkannya *corporate governance* yang baik. Padahal perusahaan adalah salah satu tulang punggung dalam pembangunan negara. Pencapaian penerapan *corporate governance* tersebut didukung dengan memperhatikan prinsip *corporate governance* yang berkesinambungan dengan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder).

Adapun prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh (Zarkasyi, 2008:38) adalah :

1. Transparansi (*Tranparancy*)

Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif dalam pengungkapan tidak hanya masalah peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting dan berpengaruh oleh proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pihak pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan, perusahaan harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas dan akurat serta dapat dipahami dan akses dengan mudah oleh pemangku kepentingan, informasi yang diungkapkan tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan serta peristiwa yang mempengaruhi kondisi perusahaan, prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan yang telah ditetapkan, kebijakan perusahaan

harus ditulis dan dikomunikasikan secara profesional kepada pihak pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas, perusahaan harus meyakini bahwa seluruh organ perusahaan serta karyawan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan peran *corporate governance*, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran utama, strategi perusahaan, sanksi dan penghargaan, seluruh organ perusahaan dan karyawan harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat tercipta kesinambungan usaha jangka panjang.

Pedoman pokok pelaksanaan, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan, perusahaan harus melakukan tanggungjawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk kelancaran dalam pelaksanaa *corporate governance*, maka perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan, organ perusahaan harus dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, masing masing perusahaan harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak saling melempar tugas dan tidak saling mendominasi sehingga dapat tercipta pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Prinsip pokok pelaksanaan, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat terkait pengambilan keputusan, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh perusahaan, meberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkaris dan melaksanakan tugasnya tanpa membedakan suku, ras dan agama.

Implementasi dari penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Hardware* yang lebih besikap teknis menyangkut pembentukkan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan *software* yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai, sikap dan etika keprilakuan. Dalam praktek nyata, banyak perusahaan yang menekankan pada nilai *hardware*. Hal ini

merupakan hal yang wajar karena aspek *hardware* hasilnya lebih nyata untuk dilihat dan dapat dilakukan dengan cepat dibandingkan dengan aspek *software* (Effendi, 2009:5).

Variabel yang digunakan pada penelitian ini untuk proksi *corporate governance* adalah komite audit. Komite audit merupakan komponen umum yang terdapat pada *corporate governance* perusahaan publik. Meluasnya tuntutan perusahaan dalam penerapan *corporate governance* tidak dapat menghindari peran komite audit guna menjembatani sekaligus mempertemukan kepentingan berbagai kelompok. Komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008:17). Sedangkan (Winata, 2014) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Menurut (Reza, 2012) menjelaskan tujuan dari pembentukan komite audit adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektivitas fungsi auditor internal maupun eksternal
4. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari dewan komisaris.

Menurut buku (Effendi, 2009) terdapat Surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta perihal keanggotaan komite audit disebutkan bahwa :

1. komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang dan merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjabat sebagai ketua komite audit.
3. Anggota komite lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen. Maksud dari pihak eksternal adalah pihak yang berasal dari luar perusahaan yang tercatat dan bukan merupakan komisaris, direksi, maupun karyawan yang berasal dari perusahaan tercatat tersebut. Sedangkan maksud dari pihak independen adalah pihak dari luar perusahaan yang tercatat tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat tersebut maupun dengan komisaris, direksi serta pemegang saham utamanya, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas dengan etika profesionalnya dengan tidak memihak dengan kepentingan siapapun.

Komite audit memegang peran yang penting dalam penerapan *corporate governance*. Maka prinsip *corporate governance* harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Adapun penerapan prinsip *corporate governance* dalam aktivitas komite audit menurut (Effendi, 2009) adalah :

1. Transparansi

Hal ini ditunjukkan dengan piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang dikomentasikan oleh notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud dari pengungkapan (*disclosure*).

2. Akuntabilitas

Ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman

dibidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.

3. Pertanggungjawaban

Prinsip ini ditunjukkan dengan aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kkepada dewan komisaris.

4. Independensi

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis maupun hubungan keluarga dengan anggota direksi maupun komisaris sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Hendaknya nama komite audit diumumkan secara publik sebagai bentuk independensi mereka.

5. Kewajaran

Prinsip ini ditunjukkan dengan sikap komite audit dalam pengambilan keputusan atas dasar sikap adil dan objektif terhadap semua pihak.

Dengan adanya komite audit diharapkan dapat berjalan secara efektif dan bernilai tambah dalam upaya menerapkan *corporate governance* pada perusahaan publik sehingga mewujudkan kepatuhan perusahaan dalam menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2.6 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya (Adisamartha dan Noviani, 2015). Pengertian lain dari leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan (Agusti, 2014). Sedangkan menurut (Harahap, 2010:306)

menyatakan bahwa leverage adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa jauh suatu perusahaan dibiayai oleh utang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Dalam praktiknya apabila dalam hasil perhitungan, perusahaan memiliki leverage yang tinggi hal ini akan berdampak akan timbulnya resiko kerugian yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki leverage yang lebih rendah maka perusahaan tersebut memiliki resiko kerugian yang lebih kecil pula. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu manajer dituntut untuk mengelola leverage dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang dihadapi (Kasmir, 2014:152).

Pengaturan rasio leverage yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua itu tergantung pada tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut (Kamir, 2014:153), yaitu :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiriyang dimiliki.

Sementara itu manfaat dari rasio leverage bagi perusahaan menurut (Kasmir, 2014:154) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban terhadap pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana dan pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis rasio leverage yang sering digunakan perusahaan menurut (Harahap, 2010:303), yaitu :

1. Rasio Utang Atas Modal

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang kepada pihak luar. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin baik. Untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah besar atau minimal memiliki nilai yang sama. Namun bagi pemegang saham atau manajemen, rasio ini sebaiknya lebih besar.

2. Rasio Pelunasan Utang

Rasio ini menggambarkan sejauh mana laba setelah dikurangi bungadan penyusutan serta biaya non kas dapat menutupi kewajiban bunga dan pinjaman. Semakin besar rasio ini maka semakin besar kemampuan perusahaan menutupi

utang-utangnya karena perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memperoleh laba jauh melebihi kewajiban pembayaran utang atau kewajibannya.

3. Rasio Utang Atas Aktiva

Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin besar rasio ini maka semakin baik kinerja perusahaan karena porsi utang lebih kecil daripada porsi aktiva yang dimiliki perusahaan.

Leverage merupakan penggunaan sumber dana tertentu yang akan mengakibatkan beban tetap yang berupa biaya bunga. Sumber dana ini dapat berupa sumber dana obligasi, kredit dan bank dan sebagainya. Leverage timbul apabila perusahaan mempergunakan utang jangka panjang dengan bunga tetap untuk membiayai investasinya, karena bunga yang sifatnya tetap ini, perusahaan tetap menanggung bunga terlepas apakah perusahaan memperoleh laba atau tidak. Pada saat laba perusahaan kecil, beban bunga tetap akan menurunkan hasil kepada pemegang saham. Sebaliknya biaya bunga adalah biaya yang dapat dikenakan pajak. Karenanya perusahaan mendapatkan subsidi atas bunga akan meningkatkan hasil kepada para pemegang saham (laba setelah pajak).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

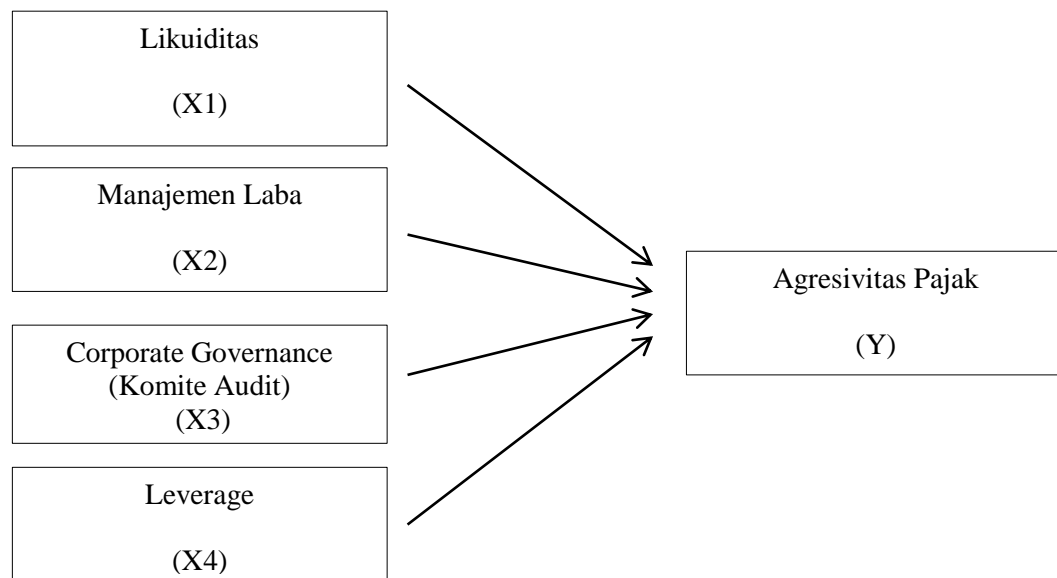
No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Tiaras dan Wijaya (2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap agresivitas Pajak Perusahaan. Sedangkan Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.

2	Agustina (2016)	Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Likuiditas dan Leverage Mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.
3	Suyanto (2012)	Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Leverage dan Manajemen Laba memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
4	Adisamartha dan Noviari (2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan	Likuiditas dan intensitas persediaan perusahaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Leverage dan intensitas aset tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.
5	Damayanti dan Susanto (2015)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Konstitusional, Resiko Perusahaan	Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Konstitusional Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan

		dan <i>Return On Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Resiko Perusahaan dan Return On Assets Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Fikriyah (2013)	Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Karakteristik Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Likuiditas, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat diketahui kerangka pemikiran mengenai agresivitas pajak sebagai variabel dependen dan likuiditas, manajemen laba, corporate governance serta leverage sebagai variabel independen.



2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Likuiditas Merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Subramanyam dan Wild, 2013). Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan berada dalam kondisi yang baik, sebaliknya semakin kecil rasio likuiditas maka keadaan arus kas perusahaan dianggap dalam kondisi yang kurang baik. Menurut hasil penelitian (Adisamartha dan Noviari, 2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian pertama sebagai berikut :

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan

2.9.2 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Salah satu alasan adanya manajemen laba adalah motivasi pajak. Manajemen laba didefinisikan sebagai suatu tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost* (Soga, Noholo, Pangoliu, 2015). Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena besarnya pajak berkaitan dengan besarnya laba. Sedangkan laba dijadikan indikator keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan. Jadi, jika perusahaan melakukan pelaporan keuangan secara agresif, maka juga dilakukan rekayasa terhadap pelaporan pajak. Penelitian yang dilakukan (Sari, Pratomo dan Yudowati, 2015) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu sebagai berikut :

H2 : Manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

2.9.3 Pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Salah satu komponen umum yang terdapat didalam *corporate governance* adalah komite audit. Komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus dan memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite audit disini sebagai bagian dari *corporate governance* yang memiliki fungsi penting dalam perusahaan, salah satunya adalah menjaga kualitas laporan keuangan agar bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun. Salah satu kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah penghindaran pajak. Adanya komite audit yang berkualitas mampu meningkatkan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan. (Damayanti dan Susanto, 2015) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh komite audit terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas perusahaan

2.9.4 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana lainnya yang memiliki biaya tetap dengan tujuan dapat meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Semakin tinggi nilai leverage dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak pada perusahaan tersebut (Agustina, 2016). Karena perusahaan dengan hutang yang tinggi maka akan menimbulkan biaya bunga yang tinggi pula, biaya bunga inilah yang akan mengurangi laba kena pajak, laba kena pajak yang berkurang juga akan mengurangi beban pajak yang menjadi beban perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kuriyah dan Asyik, 2016) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan hipotesis terakhir sebagai berikut :

H4 : Leverage mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.